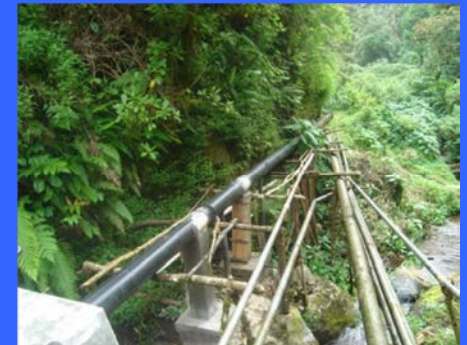


**PEDOMAN TEKNIS  
IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN  
TA. 2016**



**DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2016**

## KATA PENGANTAR

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian sub sektor tanaman pangan.


Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan ini disusun untuk memberikan panduan bagi pelaksana di tingkat lapangan agar dapat melaksanakan kegiatan pengembangan irigasi perpompaaan/perpipaan dengan baik dan terarah. Pedoman ini memuat arahan secara garis besar tentang persyaratan pemilihan lokasi dan petani/keompok tani/ P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), komponen kegiatan dan ketentuan teknis, tata cara pelaksanaan maupun sistem monitoring dan evaluasinya.

Dengan disusunnya pedoman ini diharapkan adanya kesamaan pemahaman antara petugas Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengembangan irigasi perpompaaan/perpipaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Selanjutnya **Pedoman Teknis ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota** yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing.

Akhirnya harapan kami semoga pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga harapan masyarakat petani dalam upaya

meningkatkan produksi hasil pertanian dapat tercapai melalui upaya pemanfaatan sumber air sekitar, di luar sistem irigasi teknis.

Jakarta, Januari 2016  
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian,

  
**Sumarjo Gatot Irianto**  
NIP. 196010241987031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	2
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Istilah dan Pengertian.....	3
<b>Bab II PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
2.1. Pengorganisasian.....	5
2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional) .....	7
2.3. Pelaksanaan Kegiatan.....	9
<b>Bab III MONITORING, EVALUASI DAN</b>	
<b>    PELAPORAN.....</b>	<b>16</b>
3.1. Analisa dan Pengendalian Risiko.....	16
3.2. Indikator Keberhasilan.....	19
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .....	19
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan pola/intensitas tanam padi menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dapat dipastikan kegiatan budidaya tanaman akan berjalan dengan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk menuntut untuk selaras dengan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air tanaman serta memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan kegiatan Pengembangan Irigasi Air Permukaan yang jenis kegiatannya dapat berupa Irigasi Perpompaan atau Irigasi Perpipaian yang sumber airnya berasal dari sungai, mata air, danau, embung, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

## **1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **A. Maksud**

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/perpipaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa).

### **B. Tujuan**

Tujuan kegiatan adalah:

1. Membangun sistem irigasi perpompaaan/ perpipaan sebanyak 2.000 unit di 30 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Meningkatkan intensitas pertanaman sebesar 0,5 pada lahan sawah
3. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.

## C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaan/ perpipaan sebanyak 2.000 unit di 30 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Meningkatnya Intensitas Pertanaman sebesar 0,5 pada lahan sawah.
3. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Rawa meliputi :

1. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
2. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
4. Penutup

### 1.5 Istilah dan Pengertian

1. **Air Permukaan** adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air);
2. **Air tanah** adalah sumber air yang berasal didalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
3. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolis atau struktur geologi.
4. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);

5. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di permukaan tanah;
6. **Irigasi Perpompaan** adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.
7. **Irigasi Perpipaan** adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa.
8. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
9. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
10. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
11. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon
12. **Pipa besi** tuang atau “cost iron pipe” adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
13. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai kepipa sekunder.
14. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinyl chlorida.
15. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
16. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
17. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
18. **Bangunan sadap** adalah bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa.
19. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dangan menyabang.



## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan Irigasi perpompaan/ perpipaan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan Desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

#### A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab	: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ketua	: Direktur Irigasi Pertanian
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina ditingkat pusat:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpompaan/perpipaan.
2. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan/perpipaan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

#### B. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pertanian Provinsi
------------------	-----------------------------------

Ketua	: Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim di tingkat provinsi:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
Ketua	: Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan.

4. Menetapkan calon penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi).
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Perpompaaan/Perpipaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

#### D. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan:

1. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan.
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.
3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## 2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)

### A. Sumber Dana

1. Dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan fisik.
2. Dana APBD provinsi dan/atau kabupaten untuk komponen kegiatan pendukung yaitu: SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi

3. Dana swadaya masyarakat dimungkinkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

## **B. Rincian Pembiayaan**

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Irigasi perpompaan/perpipaan sebesar Rp 80.000.000 dialokasikan untuk pelaksanaan konstruksi pengembangan irigasi perpompaan/ perpipaan, antara lain: pengadaan pompa, pipa dan perlengkapannya, bak penampung, bangunan sadap, boks bagi, dll.

## **C. Dukungan Pembiayaan Fisik**

Kegiatan fisik irigasi perpompaan/perpipaan didanai dari APBN dan dimungkinkan juga dari tambahan dana swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain-lain

## **D. Dukungan Pembiayaan Operasional**

- 1) Pemerintah Daerah Tk I/TK II berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- 2) Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

## **2.3 Pelaksanaan Kegiatan**

### **2.3.1 Ketentuan Kegiatan**

#### **A. Standar Teknis**

1. Komponen Irigasi Perpompaan meliputi: mesin pompa air, pipa/selang hisap/buang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan.
2. Komponen Irigasi Perpipaan meliputi: Bangunan Sadap, pipa/selang hisap/buang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan.
3. Saluran distribusi dapat berupa saluran tertutup (PVC, besi) maupun saluran terbuka (saluran irigasi ferosemen atau pasangan batu).
4. Luas lahan Kelompok tani/Gapoktan, P3A/GP3A penerima bantuan adalah Hamparan Tanaman Pangan minimal 20 ha.

#### **B. Kriteria Lokasi dan Petani**

##### **1. Kriteria Lokasi**

Kriteria Lokasi untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan adalah:

- Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah lokasi pada area pengembangan tanaman pangan dengan letak sumber air lebih rendah dari lahan yang akan diairi.
- Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan adalah lokasi pada area pengembangan tanaman pangan dengan letak sumber air berada lebih tinggi dari lahan yang akan diairi.

- Lokasi diprioritaskan pada lahan yang sering mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau.
- Lokasi dekat dengan Sumber Air.

## **2. Kriteria Penerima Bantuan**

- Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan dan/atau P3A.
- Poktan/Gapoktan dan/atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- Poktan/Gapoktan dan/atau P3A yang sudah membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.

### **2.3.2 Tahapan Pelaksanaan**

#### **A. Persiapan**

1. Survei, Investigasi dan Desain (SID)
2. Persyaratan Administrasi
3. Penyusunan RAB / RUKK
4. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK.
5. Pencairan dana bantuan Tahap I

#### **B. Pelaksanaan konstruksi**

1. Pembersihan Lokasi
2. Pembelian Bahan Material
3. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
4. Konstruksi
5. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK apabila prestasi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50 % dari tahap I.

## 6. Pencairan dana bantuan Tahap II

### 2.3.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan melibatkan partisipasi kelompok tani/Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait.

#### A. Persiapan

##### 1. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan baik dari segi teknis maupun sosial.
- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.

- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## 2. Persyaratan Administrasi

- PPK menetapkan Tim Teknis / Koordinator Lapangan.
- Tim Teknis / Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
- PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK pada lembaga penerima bantuan.
- PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.

## 3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan, (iv) besaran biaya, v) jumlah tenaga kerja vi) sumber biaya dan hal lain apabila diperlukan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim



teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

## **B. Pelaksanaan Fisik/Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi pengembangan Irigasi Perpompaaan/perpipaan dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah.

Dalam penentuan jenis kegiatan yang akan dipilih, harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Terdapat pilihan alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **1. Irigasi Perpompaaan**

Komponen untuk kegiatan Irigasi Perpompaaan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pompa Air**

Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas ukuran disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

#### **b. Bak Penampung**

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

#### **c. Jaringan distribusi**

Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc ataupun besi. Sedangkan untuk sistem saluran

terbuka dapat terbuat dari fero semen atau pasangan batu, yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan di iri.

Tahapan pelaksanaan irigasi perpompaan antara lain:

- a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
- b. Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
- c. Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan di iri.
- d. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.

## **2. Irigasi Perpipa**

Komponen dalam pengembangan irigasi perpipa, antara lain:

- a. Bangunan sadap  
Bangunan sadap merupakan bangunan yang berfungsi untuk menyadap/ mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa. Dimensi bangunan sadap disesuaikan dengan kondisi area setempat.
- b. Bak Penampung  
Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan di iri. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.
- c. Jaringan distribusi  
Saluran distribusi dapat terbuat dari pvc ataupun besi yang berfungsi untuk membawa dan atau

membagi air ke lahan yang akan diari, Box Bagi, Bak Kontrol (sesuai kebutuhan di lapangan).

Tahapan pelaksanaan irigasi perpipaan antara lain:

- a. Membuat bangunan sadap dengan dimensi yang disesuaikan dari sumber airnya.
- b. Pemasangan pipa (ukuran diameter pipa diurutkan besarnya dari sumber air sampai dengan bak pembagi, pipa intake (masuk) dari bangunan sadap harus disediakan stop kran sebagai pengaman agar tidak terjadi kelebihan air di pipa outake (keluaran) yang mengakibatkan banjir. Di setiap titik rawan pipa harus ditambahkan nozle pembuangan tekanan udara agar tidak terjadi pecahnya pipa).
- c. Dibuatkan bak/boks pembagi yang mengarahkan aliran air ke lahan pertanian melalui saluran terbuka/tertutup.

### **C. Pembelian Peralatan (Pompa dan Pipa)**

1. Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan, termasuk untuk kegiatan pembelian pompa dan pipa dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat.
2. Kebutuhan dan spesifikasi alat disesuaikan dengan rekomendasi teknis wilayah setempat.

### **D. Partisipasi Petani**

P3A dan/atau Poktan diwajibkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

## BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 3.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) irigasi perpompaan/perpipaan dilakukan agar kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis kegiatan hasil analisis resiko.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern. Untuk itu diperlukan *check list* sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Irigasi Perpompaan/Perpipaan. *Check list* terlampir.

Pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

### a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

### b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian  
Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

### c. Tingkat Dinas Kabupaten/Kota

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten/Kota

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

## 2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2016
- Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2016
- Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2016
- Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan  
Desember 2016

### 3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

#### a. Tingkat Pusat

- a.1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat.
- a.2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi.
- a.3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota.

#### b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### c. Tingkat Kabupaten/Kota

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dan P3A/ GP3A/ Poktan/ Gapoktan.

### 4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan *check list* pengendalian sebagaimana terlampir.

## 5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan laporan dari Kabupaten/Kota.

Format pelaporan menggunakan *check list* pelaporan pengendalian (terlampir) dan mengikuti jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2016
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2016
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2016
- Triwulan IV : Disampaikan minggu IV bulan Desember 2016

### 3.2 Indikator Keberhasilan

Output dari kegiatan ini adalah terbangunnya irigasi Perpompaaan/Perpipaan sebanyak 3.000 unit di 31 propinsi.

### 3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### A. Monitoring dan Evaluasi

##### 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Pusat

- a. Menyusun pedoman teknis irigasi perpompaaan/ perpipaan.
- b. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaaan/ perpipaan.

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

## **2. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Provinsi**

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan dari kabupaten/kota untuk disampaikan ke pusat.

## **3. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Kabupaten**

- a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pelaksana kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

## **B. Pelaporan**

1. Laporan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara on-line (MPO).



## 2. Alur pelaporan

- a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengirimkan laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Irigasi Pertanian, dengan alamat :

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

d/a. Kampus Kementerian Pertanian

Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3

Ragunan, Jakarta Selatan

atau melalui Fax : 021 7816086

E-mail: [simonevPSP@deptan.go.id](mailto:simonevPSP@deptan.go.id).

cc. [airirigasi.pai@gmail.com](mailto:airirigasi.pai@gmail.com)

dan Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,

Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

- b. Dinas Provinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alamat :

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

d/a. Kampus Kementerian Pertanian

Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3

Ragunan, Jakarta Selatan

atau melalui Fax : 021 7816086

E-mail: [simonevPSP@deptan.go.id](mailto:simonevPSP@deptan.go.id).

cc. [airirigasi.pai@gmail.com](mailto:airirigasi.pai@gmail.com).

dan Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,

Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

### 3. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan, yaitu :
  - Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan tahun berjalan (2016) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.
  - Laporan Akhir kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan

pekerjaan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format geodatabase (\*.gdb) atau shapefile (\*.shp), sedangkan untuk boks bagi dan pintu air dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.

- Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

## **BAB IV PENUTUP**

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaaan dipandang dapat mendukung program swasembada pangan melalui upaya pemanfaatan air permukaan melalui sistem irigasi perpompaaan atau perpipaaan khususnya pada lahan tadah hujan atau lahan diluar sistem irigasi teknis. Pedoman teknis kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaaan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan di tingkat lapangan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan tahapan yang telah disusun dengan baik.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pengembangan irigasi perpompaaan/perpipaaan, peranan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait sangat diperlukan sehingga output dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

**Jadwal Tentative Pelaksanaan  
Kegiatan Tugas Pembantuan**

<b>No</b>	<b><i>Uraian Kegiatan</i></b>	<b><i>Waktu Pelaksanaan</i></b>
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2016</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari-Februari 2016</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari-April 2016</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Februari-September 2016</i>

**Lampiran 2**

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

**RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK/RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI  
 PERPOMPAAN/PERPIPAAN**

Yth.  
 Kuasa Pengguna Anggaran .....  
 Kab/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen .....  
 No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan  
 Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan, dengan ini kami  
 mengajukan permohonan pencairan dana kepada petani sebesar  
 Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok  
 (RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. Pekerjaan Persiapan : 1. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	B. Pekerjaan Konstruksi : a. Bangunan sadap/boks bagi/bak penampung 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja. b. Saluran distribusi 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja.	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.
	C. Pembelian Peralatan : .....	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.
	<b>Jumlah</b>	Rp.	Rp.	Rp.

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Pemerintah agar dipindahbukukan ke rekening UPKK ..... dengan Nomor Rekening ..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI,

Koordinator UPKK

Ketua Kelompok

.....

.....

Ketua Tim Teknis,

.....

NIP.

MENGETAHUI  
Kepala Dinas  
Kabupaten/Kota.....

.....

NIP.





**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
T.A. 2016**

Dinas : .....  
 Propinsi : .....  
 Subsektor : .....  
 Program : .....  
 Bulan : .....

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota .....	Pengelolaan Air Irigasi	Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan							

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan  
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [simonevpta@deptan.go.id](mailto:simonevpta@deptan.go.id)
3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll

\*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP

\*\*\*) Corel yang tidak perlu

....., ..... 2016

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

## Lampiran 5

Form PSP 03

### LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TA. 2016

1. DINAS : .....
2. KABUPATEN : .....
3. PROVINSI : .....
4. SUBSEKTOR : .....

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Unit)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

#### Keterangan :

\* : diisi dengan jumlah irigasi perpompaan/perpipaan yang dibangun (Meter)

\*\* : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

#### Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2016
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan  
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevla@deptan.go.id dan pelaporanditpaicpsp@yahoo.com

....., .....2016

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

**OUTLINE LAPORAN AKHIR**

- I. PENDAHULUAN**
    - A. Latar Belakang
    - B. Tujuan dan Sasaran
  - II. PELAKSANAAN**
    - A. Lokasi
    - B. Tahap Pelaksanaan
    - C. Permasalahan
    - D. Pemecahan Masalah
  - III. HASIL**
  - IV. MANFAAT**
  - V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

**A. CHECK LIST PROVINSI**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT PROPINSI**

DINAS KABUPATEN :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1.  
 : 2.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala Dinas	.....Unit
5	Sudah transfer dana	..... Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	..... Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT PROPINSI**

NAMA DINAS PROPINSI :  
 TARGET SELURUH PROPINSI : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala Dinas	.....Unit
5	Sudah transfer dana	..... Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	..... Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Kepala Dinas.....

(.....)

**B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

KELOMPOK PENERIMA :  
 - NAMA KELOMPOK TANI / P3A :  
 - DESA :  
 - KECAMATAN :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1.  
 : 2.  
 : 3.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sudah ada SID (desain sederhana)	Sudah / Belum
2	SK penetapan lokasi / kelompok tani oleh Kepala Dinas	Sudah / Belum
3	Sudah transfer dana	Rp.....
4	Sudah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....%
6	Sudah dimanfaatkan	Sudah / Belum

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NAMA DINAS KABUPATEN :  
 TARGET SELURUH KABUPATEN : ..... Unit (Rp .....)  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlatk SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transper dana kepada kelompok tani	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok tani	.....Unit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Kepala Dinas.....

(.....)

**C. CHEK LIST TINGKAT PUSAT**

**CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT PUSAT**

DINAS PROPINSI :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1.  
 : 2.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transfer dana	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	.....Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN TINGKAT PUSAT**

INSTANSI :  
 TARGET SELURUH PROPINSI : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok tani	.....Unit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Direktur Pengelolaan Air Irigasi,

(.....)

**Lampiran 10**

Lampiran : Format Laporan Penilaian Risiko Triwulan ....

**LAPORAN PENGENDALIAN ANALISA DAN MITIGASI RISIKO  
KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN/PERPIPAAN  
TRIWULAN ....**

Unit Kerja :

Nama Pimpinan :

NIP. :

Tujuan Kegiatan : 1. Membangun sistem irigasi perpompaan/  
perpipaan sebanyak 2.000 unit di 31 propinsi  
untuk mendukung komoditas tanaman pangan.  
2. Meningkatkan intensitas pertanian sebesar 0,5  
pada lahan sawah  
3. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi  
pada lahan tanaman pangan.

No.	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Risiko	Laporan Mitigasi Risiko
					Tindak Lanjut Triwulan ...
<b>A.</b>	<b>Organisasi</b>				
1.		•			
2.					
<b>B.</b>	<b>Kebijakan</b>				
1.		•			
2.					
<b>C.</b>	<b>Sumberdaya Manusia</b>				
1.		•			
2.					
<b>D.</b>	<b>Prosedur</b>				
1.		•			
2.					

....., 2016  
Tim Pembina/Pelaksana/SPI

.....

## CONTOH 1. DOKUMENTASI KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN



**Gambar 1. Sumber Air Permukaan**



**Gambar 2. Pompa Air**





**Gambar 3. Bak Penampung Air**

## CONTOH 2. DOKUMENTASI KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN



**Gambar 1. Sumber Air Permukaan**



**Gambar 2. Pipa Intake Ke Pompa**



**Gambar 3. Rumah Pompa dan Pompa Air**



**Gambar 4. Bak Penampung**

**CONTOH 1. DOKUMENTASI KEGIATAN IRIGASI PERPIPAAN**



**Gambar 1. Bangunan Sadap**



**Gambar 2. Pipa Besi Distribusi**



**Gambar 3. Boks Bagi**

## CONTOH 2. DOKUMENTASI KEGIATAN IRIGASI PERPIPAAN



**Gambar 1. Bangunan Sadap**



**Gambar 2. Pipa Distribusi**





**Gambar 3. Boks Bagi**